

# Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal: Studi Pengabdian di Kabupaten Bangli

<sup>1)</sup>Putu Dinda Sashia Putri, <sup>2)</sup>Komang Widhya Sedana Putra P, <sup>3)</sup>Ni Wayan Lasmi

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia  
Email Corresponding: [dindahashia@gmail.com](mailto:dindahashia@gmail.com)

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b> Pekerja Informal Jaminan Sosial Inovasi Layanan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inisiatif strategis BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar di Kabupaten Bangli dalam meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial. Fokus utama penelitian ini adalah memahami sejauh mana program BPJS Ketenagakerjaan telah menjangkau pekerja informal, mengidentifikasi kebutuhan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, serta menjelajahi penggunaan teknologi informasi dan inovasi layanan untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai inisiatif strategis BPJS Ketenagakerjaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pekerja informal, pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan tokoh masyarakat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Ketenagakerjaan telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja informal terhadap program jaminan sosial. Kampanye sosialisasi melalui media sosial dan workshop di komunitas lokal berhasil meningkatkan pemahaman pekerja informal tentang pentingnya jaminan sosial. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala seperti keterbatasan akses informasi dan layanan di daerah pedesaan serta keberatan pekerja informal terhadap besarnya iuran. Untuk mengatasi hambatan ini, penelitian merekomendasikan pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan pendaftaran dan klaim serta menyediakan fitur edukasi, serta implementasi layanan berbasis lokasi di tempat strategis seperti pasar atau pusat komunitas. Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan lokal secara aktif dan membentuk forum komunikasi reguler dapat menciptakan sinergi efektif dalam sosialisasi dan pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun inisiatif BPJS Ketenagakerjaan memberikan dampak positif, diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja informal.</p>
	<p><b>ABSTRACT</b></p>

**Keywords:**

Informal Workers  
Social Security  
Service Innovation

This study aims to examine the strategic initiatives of BPJS Ketenagakerjaan in Gianyar Branch, Bangli Regency, in increasing the participation of informal workers in social security programs. The primary focus is to understand the extent to which BPJS Ketenagakerjaan programs have reached informal workers, identify the need for more integrated and sustainable strategies, and explore the use of information technology and service innovations to enhance informal worker participation. This study uses a qualitative approach with a case study method to gain an in-depth understanding of BPJS Ketenagakerjaan's strategic initiatives. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders, including informal workers, BPJS Ketenagakerjaan officials, and local community leaders. The findings indicate that BPJS Ketenagakerjaan's initiatives have increased awareness and participation of informal workers in social security programs. Social media campaigns and community workshops have successfully improved informal workers' understanding of the importance of social security. However, the study also identified obstacles such as limited access to information and services in rural areas and the reluctance of informal workers to pay contributions. To overcome these barriers, the study recommends developing a mobile application that facilitates registration and claims, provides educational features, and implements location-based services in strategic places like markets or community centers. Additionally, actively involving local stakeholders and forming regular communication forums can create effective synergy in outreach and registration efforts. The study concludes that while BPJS Ketenagakerjaan's initiatives have had a positive impact, further development is needed to achieve more comprehensive protection for informal workers.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara konstitusional yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, Indonesia harus tegas memastikan terwujudnya hak hidup sehat bagi semua orang. Salah satu bentuk pembangunan kesehatan adalah dengan adanya jaminan sosial sebagai upaya meningkatkan perlindungan sosial terhadap pekerja (Suanda & Subawa, 2023). Sesuai dengan cita-cita negara Indonesia, jaminan sosial bagi pekerja merupakan hak asasi manusia mendasar yang harus diwujudkan bersamaan dengan hak warga negara (Baskoro, 2021).

Jaminan sosial adalah pemberian layanan pendapatan dan bantuan oleh negara dan lembaga publik kepada individu atau rumah tangga yang mengalami kesulitan dan tidak mampu mengatasi permasalahannya. Ini termasuk penyakit, usia tua, cacat, dan pengangguran (Juan Somavia, 2008). Jaminan sosial memberikan ketenangan pikiran kepada masyarakat bahwa mereka akan menerima dukungan keuangan jika terjadi risiko kerja seperti kecelakaan, penyakit, atau pengangguran. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masing-masing pekerja, namun juga berdampak positif terhadap produktivitas secara keseluruhan dan stabilitas ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat BPJS) adalah badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk mengatasi risiko sosial ekonomi yang timbul selama bekerja (Lestari & Yusrizal, 2023). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini bertugas memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Sementara itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi empat kelompok: "Pekerja Upahan" atau "PU", "Pekerja Bukan Penerima Upah", "Pekerja Bangunan", dan "Pekerja Migran Indonesia" (Syahrullah & Zuhri, 2024). Program jaminan sosial ketenagakerjaan akan berjalan baik jika pekerja mematuhi peraturan yang berlaku. Kesejahteraan para pekerja ini bergantung pada kesadaran para pekerja dan pengusaha yang bekerjasama dalam BPJS Ketenagakerjaan (Nur Aprilia, 2023). Meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja formal, namun masih banyak pekerja informal yang tidak tercakup dalam program asuransi sosial ini. Sementara itu, tenaga kerja informal seringkali menghadapi risiko kerja yang tinggi dan kurangnya perlindungan sosial yang memadai. BPJS Ketenagakerjaan

memungkinkan pesertanya mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja, jaminan pensiun dan manfaat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku (Adrika et al., 2023).

Berdasarkan data BPJS, sektor informal Indonesia meningkat pada tahun 2023 yaitu, sebanyak 83,34 juta pekerja non-reguler merupakan porsi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki sektor informal yang besar, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang berjualan di trotoar (Claudia & Syahril, 2024). Pekerja sektor informal merupakan pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja dan menghadapi tantangan dan risiko yang berbeda. Oleh karena itu, pekerja sektor informal harus diberikan perlindungan, retensi dan peningkatan tunjangan, sehingga meningkatkan produktivitas nasional (Ardianingsih et al., 2021) ektor informal tidak hanya tersebar luas di perkotaan, tetapi banyak juga pekerja informal di pedesaan, termasuk petani, peternak, pedagang, pengusaha mandiri, buruh harian dan lain-lain. Mengingat daerah pedesaan mempunyai keterbatasan aspek sosial ekonomi seperti daerah perkotaan, maka daerah pedesaan perlu diprioritaskan dalam mengakses program BPJS Ketenagakerjaan (Pristanti et al., 2022). Namun, meskipun pentingnya perlindungan ketenagakerjaan sudah diketahui secara luas, kesadaran dan pemahaman tenaga kerja informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif dan kurangnya perhatian terhadap pentingnya perlindungan kerja (Zakiy & Nafi'ah, 2023).

Sebagian besar penduduk Kabupaten Bangli di Bali merupakan pekerja informal, dan mayoritas dari mereka tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini mempunyai beragam alasan mengapa pekerja informal tidak berpartisipasi aktif. Alasan utama terjadinya hal ini adalah kurangnya pengakuan dan pengabaian terhadap pentingnya jaminan sosial. Selain itu, faktor ekonomi juga memegang peranan penting sehingga banyak pekerja informal yang merasa keberatan dengan iuran yang harus mereka bayarkan, apalagi ketika pendapatan mereka tidak menentu. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah terbatasnya akses terhadap informasi dan layanan, serta peraturan yang tidak sepenuhnya mendukung partisipasi pekerja informal.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah berusaha keras untuk melindungi pekerja formal dan meningkatkan kesejahteraan mereka, tantangan serupa juga dihadapi dalam konteks pekerja informal. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Yuliarini (2021) dan Anwar et al. (2023), tantangan utama untuk pekerja informal adalah rendahnya tingkat partisipasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya kesadaran, dan akses terbatas ke informasi. Hal ini juga diungkapkan dalam studi oleh Zakiy & Nafi'ah (2023), yang menunjukkan bahwa keterbatasan komunikasi dan pengabaian terhadap perlindungan kerja masih menghambat keterlibatan pekerja informal dalam program jaminan sosial. Penelitian ini mendukung temuan tersebut dengan menyoroti bahwa meskipun ada upaya dari BPJS Ketenagakerjaan, banyak pekerja informal di Kabupaten Bangli tetap belum terdaftar karena alasan serupa, termasuk kendala ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang manfaat program.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi jaminan sosial bagi pekerja informal di Kabupaten Bangli, Bali, dengan fokus pada evaluasi dampak program BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana program BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja informal dalam jaminan sosial. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi dan sosialisasi yang telah diterapkan, termasuk kampanye media sosial, workshop, seminar, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lokal, dalam memperluas jangkauan dan pemahaman program.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kendala-kendala yang dihadapi oleh pekerja informal dalam mengakses program, seperti keterbatasan informasi, aksesibilitas layanan, dan masalah ekonomi, serta memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi solusi inovatif untuk meningkatkan partisipasi, termasuk pengembangan aplikasi mobile, sistem layanan berbasis lokasi, dan kemitraan dengan lembaga lokal untuk memperbaiki efektivitas program.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga pada pengembangan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja informal di Kabupaten Bangli. Tujuan akhir adalah untuk memberikan wawasan dan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja informal.

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Analisis Situasi

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, berfokus pada pasar tenaga kerja informal, termasuk pedagang, usaha mandiri, dan pekerja harian. Tahap awal melibatkan analisis situasi untuk memahami kondisi awal pasar tenaga kerja informal di desa tersebut. Proses ini mencakup observasi langsung terhadap lingkungan kerja dan kondisi sosial-ekonomi pekerja informal, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal seperti Perbekel Desa dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai tantangan dan kebutuhan pekerja informal, serta pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber relevan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi ketenagakerjaan di desa tersebut.

## 2. Penentuan Program

Berdasarkan hasil analisis situasi, ditentukan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang relevan, yaitu program Jaminan Kematian (JKK) untuk memberikan perlindungan bagi pekerja informal. Program ini mencakup pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial serta fasilitasi pendaftaran peserta ke sistem BPJS Ketenagakerjaan.

## 3. Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Prosedur evaluasi meliputi pengumpulan data pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi pekerja informal, analisis data dengan metode deskriptif untuk menggambarkan perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan sosialisasi, serta wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dengan peserta untuk mendapatkan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan program.

## 4. Prosedur Pelaksanaan Program

a) Proses pengabdian diawali dengan koordinasi perizinan kepada Perbekel Desa Bunutin serta penyusunan dan pengujian kuesioner yang akan digunakan untuk pengumpulan data pre-test dan post-test. Koordinasi ini memastikan dukungan dan izin dari pihak desa untuk melaksanakan program.

b) Pelaksanaan sosialisasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan di kantor Perbekel Bunutin mulai pukul 09.00 WITA pada tanggal 1 Juli 2024. Materi sosialisasi mencakup pentingnya jaminan sosial, prosedur pendaftaran, dan manfaat yang diperoleh, yang disampaikan melalui presentasi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Pengumpulan data pre-test dilakukan sebelum sosialisasi dimulai untuk mengukur tingkat kesadaran dan pemahaman awal pekerja informal, sedangkan data post-test dikumpulkan setelah sosialisasi selesai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Tahap lanjutan melibatkan pendaftaran peserta ke sistem BPJS Ketenagakerjaan, pencetakan kartu, dan pendistribusian kartu peserta.

c) Alokasi sumber daya, Sumber daya yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, peralatan, material, lokasi, fasilitas, dan anggaran. Tim pelaksana terdiri dari koordinator program, fasilitator sosialisasi, dan tenaga administrasi untuk pendaftaran peserta. Perlengkapan presentasi seperti proyektor, layar, dan sound system digunakan untuk menyampaikan materi sosialisasi. Kuesioner, formulir pendaftaran, dan bahan sosialisasi seperti brosur dan leaflet disediakan untuk mendukung kegiatan. Kantor Perbekel Bunutin digunakan sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi dan pendaftaran. Anggaran diperlukan untuk biaya operasional, honorarium tim pelaksana, dan material sosialisasi.

## 5. Evaluasi dan Pelaporan

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan kesadaran dan partisipasi pekerja informal. Analisis data dilakukan dengan menghitung persentase hasil pre-test dan post-test untuk masing-masing indikator, serta menganalisis umpan balik dari peserta. Hasil analisis ini kemudian disusun dalam laporan yang mencakup metode, hasil, dan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan.

## 6. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan meliputi sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja informal tentang pentingnya jaminan sosial, sementara fasilitasi pendaftaran bertujuan untuk membantu pekerja informal mendaftar dan mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan metode dan prosedur yang sistematis ini, diharapkan program sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pekerja informal di Desa Bunutin.



Gambar 1. Flowchart Metode Pelaksanaan Pengabdian

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap orang memerlukan bentuk Jaminan Sosial, tidak peduli status ekonomi mereka, baik kaya maupun miskin. Konsep ini mencakup pembayaran premi asuransi yang sesuai dengan kemampuan finansial individu untuk melindungi diri dari berbagai risiko (Yuliarmita, 2021). Namun, salah satu tantangan utama adalah rendahnya rasio antara angkatan kerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk memindahkan risiko mereka ke lembaga jaminan sosial. Faktor utama di balik fenomena ini adalah pendapatan yang rendah dan tidak stabil, yang sering kali memaksa pekerja informal untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga mereka enggan untuk berkontribusi pada jaminan sosial. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa pekerja informal seringkali berada di ambang garis kemiskinan (Anwar et al., 2023).

Dalam upaya meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di Kabupaten Bangli, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar telah melaksanakan sejumlah strategi. Pertama, mereka melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, terutama kepada kelompok pekerja informal seperti pedagang kaki lima dan petani. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan langsung dengan komunitas-komunitas tersebut, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari jaminan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi dan memperjelas peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperluas jangkauan programnya. Ini termasuk penyelenggaraan seminar yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja informal. Kerjasama ini sangat penting karena dapat memperkuat jaringan komunikasi dan dukungan lokal yang diperlukan untuk memperkenalkan dan mendorong partisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mempermudah akses dan pendaftaran, BPJS Ketenagakerjaan juga telah mengembangkan fasilitas pendaftaran online. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mempercepat proses pendaftaran dan klaim. Dengan adanya opsi pendaftaran online, BPJS Ketenagakerjaan berusaha mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja informal, seperti keterbatasan waktu dan akses yang sulit ke lokasi pendaftaran fisik.

Sosialisasi memainkan peran kunci dalam jaminan sosial nasional dengan menyebarkan informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Banyak pekerja informal yang masih belum menyadari manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan dan menganggap bahwa BPJS hanya diperuntukkan bagi pekerja resmi atau pegawai perusahaan. Penelitian oleh (Zakiy & Nafi'ah, 2023) menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas ini menghambat partisipasi pekerja informal dalam program. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan menyeluruh sangat penting untuk mempromosikan brand BPJS Ketenagakerjaan dan mencapai tujuan untuk memasukkan seluruh pekerja ke dalam program ini (Ayu Ananda et al., 2023).

Analisis tambahan menunjukkan bahwa meskipun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal, beberapa tantangan tetap perlu diatasi. Pendekatan sosialisasi dan kemitraan lokal telah meningkatkan kesadaran, tetapi pendapatan rendah dan ketidakstabilan ekonomi yang dialami oleh pekerja informal masih menjadi hambatan signifikan. Pengembangan fasilitas pendaftaran online merupakan langkah yang baik untuk mempermudah akses, namun kesuksesan inisiatif ini sangat bergantung pada aksesibilitas teknologi dan literasi digital di kalangan pekerja informal. Selain itu, meskipun kerjasama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat memperkuat dukungan lokal, perluasan jangkauan program harus disertai dengan solusi yang lebih holistik. BPJS Ketenagakerjaan dapat mempertimbangkan model kontribusi yang fleksibel dan subsidi untuk mengatasi beban finansial pekerja informal. Pendekatan berbasis komunitas yang lebih mendalam, termasuk edukasi finansial dan bantuan langsung, serta kanal komunikasi yang lebih efektif, dapat lebih mendukung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan memastikan bahwa semua pekerja dapat memanfaatkan manfaat jaminan sosial secara optimal.



Gambar 2. Sosialisasi di Desa Bunutin, Bangli



Gambar 3. Sosialisasi di Desa Bunutin, Bangli

#### IV. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, menunjukkan bahwa pendekatan multi-platform yang diadopsi berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap

peningkatan kesadaran dan partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial. Melalui sosialisasi intensif yang melibatkan kampanye media sosial, workshop, dan seminar interaktif, pekerja informal memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan mekanisme program jaminan sosial. Upaya ini juga didukung oleh kerjasama erat dengan pemangku kepentingan lokal, yang berperan penting dalam menjembatani kesenjangan informasi dan mendorong partisipasi aktif.

Inovasi dalam penyediaan layanan, seperti pengembangan aplikasi mobile dan sistem layanan berbasis lokasi, telah mempermudah akses bagi pekerja informal yang menghadapi kendala mobilitas. Pengembangan pusat layanan pelanggan yang responsif juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan peserta terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat kesadaran dan pemahaman pekerja informal mengenai jaminan sosial, serta peningkatan jumlah pendaftaran peserta. Data analitik yang digunakan untuk memahami tren partisipasi telah membantu dalam penyesuaian strategi yang lebih efektif.

Kesimpulannya, kegiatan pengabdian ini berhasil mengatasi beberapa hambatan dalam partisipasi pekerja informal dan menunjukkan bahwa strategi yang terintegrasi dan inovatif dapat memberikan dampak positif. BPJS Ketenagakerjaan, melalui upaya ini, berhasil meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja informal di Desa Bunutin, mencerminkan komitmen mereka terhadap perbaikan berkelanjutan dan pelayanan yang lebih baik.

#### **Saran Keberlangsungan Program:**

Untuk memastikan keberlangsungan program BPJS Ketenagakerjaan, penting untuk membangun mekanisme umpan balik yang terstruktur dari peserta. Dengan menyediakan saluran bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman dan masukan mereka, BPJS Ketenagakerjaan dapat terus menyesuaikan dan meningkatkan layanannya. Keterlibatan komunitas dalam proses evaluasi juga dapat memperkuat rasa kepemilikan dan dukungan terhadap program. Dukungan yang kuat dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan, akan memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan inisiatif yang diperlukan. Perencanaan berkelanjutan yang mencakup strategi adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial, serta inovasi berkelanjutan dalam layanan, akan memastikan bahwa program tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pekerja informal di masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrika, J., Frinaldi, A., & Dela, Y. R. (2023). Kebijakan Jaminan Sosial Untuk Tenaga Kerja Sektor Informal Di Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 761–768.
- Anwar, R. F., Mulyati, H., & Rahmawati, W. J. (2023). Kesadaran Konsumen dan Niat Membeli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 604–614. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.2.604>
- Ardianingsih, A., Langelo, J. S., & Wicaksono, P. (2021). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 21(2), 8. <https://doi.org/10.54911/litbang.v21i1.158>
- Ayu Ananda, M., Handayani, W., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Dari Program Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Bpu) Di Surabaya Dan Sidoarjo. *Jurnal Sosiohumaniora Sasanti P-ISSN*, 4(3), 2722–6484.
- Baskoro, F. (2021). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Bukan Penerima Upah Pada BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Perintis Ponorogo*. 468–476. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15972/>
- Claudia, V., & Syahril. (2024). Analisis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Meningkatkan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal ( BPU ) di Kota Meulaboh. *Journal of Economics & Management*, 3(3), 159–163.
- Juan Somavia. (2008). *Jaminan sosial : konsensus baru*.
- Lestari, A., & Yusrizal. (2023). Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ayu Lestari, Analisis. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 365–372.
- Nur Aprillia, F. A. L. (2023). Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani Di Bangun Purba. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 326–333.
- Pristanti, S. N., Sukidin, S., & HartantIMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA INFORMAL (STUDI KASUS DI DESA DUKUHDEMPOK, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBERo, W. (2022). Implementasi

- Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Pada Pekerja Informal (Studi Kasus Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan ...*, 16(40), 297–308. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i2.25240>
- Suanda, A. . G. A., & Subawa, N. S. (2023). Efektivitas Penggunaan Flyer Dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan Bpjs Ketenagakerjaan. *Open Journal Systems*, 18(1978), 161–170.
- Syahrullah, M. A., & Zuhri, S. (2024). Strategi Komunikasi Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa dalam Meningkatkan Jumlah Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3013–3022. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4094>
- Yuliarmi2, M. A. A. N. N. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEKERJA INFORMAL DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA DENPASAR. *Pendidikan Kimia PPs UNM*, 1(1), 91–99.
- Zakiy, M. W., & Nafi'ah, B. A. (2023). Sosialisasi Program Jamnian Sosial Ketenagakerjaan Kepada UMKM Di Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya oleh BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri (JPMM)*, 1(2), 1–5.